

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arus globalisasi yang tengah merasuki peradaban dunia telah memicu berbagai dampak yang sangat signifikan dalam pelbagai bidang kehidupan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah perubahan dan perkembangan dalam bidang ekonomi. Dewasa ini, sistem perekonomian global yang kian santer diterapkan dan menjadi sebuah kekuatan yang dominan dalam percaturan dunia adalah sistem ekonomi pasar bebas atau neoliberalisme. Neoliberalisme merupakan paham yang memperjuangkan hak-hak dan pemikiran individu. Paham ini menggunakan logika pasar sebagai basis utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menolak campur tangan Negara atas pasar.

Dalam pengimplentasiannya, sistem ekonomi tersebut menelurkan kebijakan-kebijakan yang di antaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, Negara mesti membiarkan perusahaan swasta untuk mengatur sistem perekonomian dengan cara memberi kebebasan terhadap perdagangan internasional dan investasi asing serta melenyapkan kontrol Negara atas harga pasar. *Kedua*, Negara mesti mengurangi pemborosan dengan memangkas anggaran Negara yang tidak produktif seperti subsidi pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya. *Ketiga*, Negara mesti meniadakan segala bentuk regulasi yang menghalangi kebebasan ekonomi. *Keempat*, keyakinan terhadap privatisasi dengan menjual semua perusahaan Negara kepada investor. *Kelima*, Negara mesti menghilangkan gagasan tentang “barang publik” atau “gotong royong” dan digantikan dengan paham “tanggung jawab individu”.¹ Pelbagai kebijakan di atas menandakan bahwa pemilik modal atau kaum kapitalis merupakan aktor utama yang menggerakkan sistem ekonomi neoliberalisme. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi neoliberalisme disebut juga dengan sistem ekonomi kapitalisme-neoliberal.

Salah satu tujuan utama dibentuknya sistem ekonomi pasar bebas yakni mendongkrak perekonomian negara-negara berkembang. Oleh karena itu, sistem ekonomi tersebut diprioritaskan untuk diterapkan di pelbagai negara berkembang.

¹ Etty Soesilowati, “Neoliberalisme: antara Mitos dan Harapan”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 2:2 (Semarang: September 2009), hlm. 128-129.

Namun dalam penerapannya, sistem ekonomi tersebut justru membawa sebuah eksek atau patologi tersendiri khususnya bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.²

Sejauh ini, ada beragam patologi sosial yang disebabkan karena adanya penerapan sistem perekonomian pasar bebas pada negara-negara berkembang yang hendak dikemukakan. *Pertama*, kesenjangan ekonomi antara penduduk yang kaya dan yang miskin. Studi yang dilakukan Johannes Muller sebagaimana dikutip Mathias Daven memperlihatkan bahwa di era globalisasi ini jurang antara penduduk yang kaya dan yang miskin semakin lebar di mana 20% orang kaya menikmati 82,7% pendapatan dunia sedangkan 80% warga miskin hanya menikmati 17,3% pendapatan dunia secara keseluruhan.³ Pertanyaan mendasarnya adalah siapakah yang termasuk dalam kelompok kaya dan siapakah yang termasuk dalam kelompok miskin? Kelompok kaya adalah mereka yang menjadi aktor utama dalam menggerakkan sistem ekonomi tersebut yakni segelintir pemilik modal atau kaum kapitalis sedangkan kelompok miskin adalah mayoritas masyarakat kelas rendah. Dengan modal yang dimiliki, kaum kapitalis mampu menguasai dan mengatur sistem perekonomian masyarakat kelas rendah.

Pada tahun 2013, majalah Forbes di Amerika Serikat membeberkan data tentang para miliader di seluruh dunia. Dari data yang ditunjukkan tampak bahwa Negara yang menyumbang miliader terbanyak adalah Amerika Serikat yakni sebanyak 1442 miliader dari 31% miliader di dunia yang didata majalah *Forbes*. Total kekayaan mereka adalah US\$ 1,87 triliun. Sementara itu, Indonesia sendiri menempati posisi ke-12 dengan jumlah 25 miliader. Jumlah kekayaan 25 miliader ini sebesar US\$ 55,1 miliar yang nilainya sama dengan setengah dari APBN Indonesia pada tahun 2011. Majalah *Forbes* juga menunjukkan bahwa para miliader tersebut merupakan investor atau konglomerat/pemimpin perusahaan/pengusaha yang adalah aktor utama dari sistem neoliberalisme. Sumber kekayaan mereka berasal dari pengeksploitasian sumber daya alam negara-negara berkembang dan monopoli pasar baik dari segi harga maupun penjualan. Faktum ini menyebabkan

² Mathias Daven, "Gereja sebagai *Global Player* dan Solidaritas Global dengan Kaum Miskin", dalam Max Regus dan Fidelis Den (eds.), *Lakukan Semua dalam Kasih: Kenangan Tahbisan Uskup Mgr. Siprianus Hormat Uskup Keuskupan Ruteng* (Jakarta: Penerbit Obor, 2020), hlm. 127.

³ *Ibid.*

kekayaan tidak menetes ke bawah (*trickle down*) yakni kepada masyarakat kecil tetapi menetes ke atas (*trickle up*) yakni kepada para pemilik modal atau kaum kapitalis.⁴ Dengan demikian mayoritas masyarakat miskin akan menjadi semakin miskin dan minoritas pemilik modal akan menjadi semakin kaya.

Kedua, menjamurnya perusahaan-perusahaan industri pertambangan di negara-negara berkembang. Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang sangat menjanjikan. Industri ini mampu meraup keuntungan yang optimal dari segi produktifitas penghasilannya sebab pengelolaannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perkembangan perusahaan-perusahaan nasional maupun transnasional yang bergerak dalam sektor industri pertambangan dipercepat oleh adanya proses globalisasi yang mampu melampaui sekat-sekat antar negara. Industri pertambangan menggunakan kesempatan ini untuk menginvestasikan modalnya guna mengeksploitasi sumber kekayaan alam yang dimiliki negara-negara berkembang. Pengeksploitasian sumber kekayaan alam ini sudah barang tentu mengakibatkan problem lanjutan pada negara yang bersangkutan sebagaimana yang terjadi di Indonesia. John Roosa sebagaimana dikutip Alex Jebadu menerangkan bahwa demi mencapai pertumbuhan dan peningkatan ekonomi, Soeharto sebagai presiden ke-2 Republik Indonesia yang digadagadag sebagai bapak pembangunan melakukan kerjasama multilateral dengan negara-negara kapitalisme barat. Dalam proses kerja sama yang dilangsungkan, Soeharto mengizinkan dan memberi peluang kepada para investor asing untuk menjalankan aktivitas usaha mereka di Indonesia dengan melegalkan beberapa regulasi seperti UU No.1/1967 tentang penanaman modal asing, UU No. 5/1967 tentang pengelolaan Kehutanan dan UU No. 11/1967 tentang industri Pertambangan.⁵

Industri-industri ekstraktif berskala besar ini kemudian menjamur di pelbagai daerah di Indonesia dengan tujuan utamanya adalah mencaplok dan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di daerah bersangkutan. Permasalahan yang muncul akibat dari pengeksploitasian kekayaan alam di berbagai daerah di Indonesia oleh perusahaan-perusahaan pertambangan asing di antaranya adalah

⁴ Alex Jebadu, *Bahtera Terancam Karam* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2018), hlm. 22-23.

⁵ *Ibid.*, hlm. 132-138.

degradasi lingkungan hidup dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat kecil.⁶

Ketiga, kasus korupsi. Masalah pelik yang sering kali dihadapi oleh banyak negara khususnya oleh negara Indonesia adalah masalah atau kasus korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga *Gallup World* dan *The Global Competitiveness Report (GCR)* pada tahun 2013 menunjukkan bahwa index kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh para pebisnis yang berafiliasi dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Data menunjukkan bahwa 91% kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh para pebisnis atau pemilik modal yang berafiliasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bentuk korupsi ini disebut dengan *patron-client*. Dalam kasus ini pemerintah bertindak sebagai *patron* yang melindungi kepentingan *client*-nya yakni para pemilik modal/perusahaan-perusahaan nasional maupun transnasional.⁷

Globalisasi ekonomi dalam bentuk yang paling mutakhir sebagaimana yang tercermin dalam sistem ekonomi pasar bebas atau neoliberalisme telah merasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sistem ini tidak saja bercokol dalam skala global ataupun nasional tetapi juga terjadi dan bercokol pada skala lokal, khususnya dalam lingkup wilayah tiga Kabupaten di Keuskupan Ruteng yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur, dalam mana sistem ekonomi pasar bebas atau neoliberalisme telah menyebabkan pelbagai persoalan dan pergolakan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Persoalan pertama yang dihadapi oleh masyarakat adalah masalah kemiskinan. Data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2021 memperlihatkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur menjadi Kabupaten termiskin ke-8 dari 22 Kabupaten di NTT dengan angka presentase kemiskinan sebesar 26,50%. Kabupaten Manggarai menempati posisi ke-15 sebagai Kabupaten termiskin dengan angka presentase kemiskinan sebesar 20,48%. Sementara itu, Kabupaten Manggarai Barat menempati posisi ke-16 sebagai Kabupaten termiskin dengan angka presentase kemiskinan sebesar 17,92%.⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 80.

⁷ *Ibid.*, hlm. 56.

⁸Badan Pusat Statistik NTT, *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten atau Kota*, <https://ntt.bps.go.id/indicator/23/584/1.html>, diakses pada 13 Februari 2023.

Ada dua faktor yang menyebabkan kemiskinan di Manggarai. *Pertama*, faktor internal. Faktor internal ini berakar pada pribadi masyarakat itu sendiri seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia, malas, pola hidup konsumtif, mental instan, hedonis, sikap pasrah pada nasib, kurang kreatif dalam pekerjaan dan dalam manajemen keuangan. *Kedua*, faktor eksternal atau kemiskinan struktural. Faktor ini disebabkan oleh struktur yang tidak adil. Sekarang ini, masyarakat Manggarai tengah dikungkung oleh sistem kapitalisme yang memonopoli perekonomian masyarakat. Permasalahan yang seringkali terjadi adalah para pemilik modal memonopoli pabrik pembuatan pupuk sehingga masyarakat masih bergantung pada pupuk pabrik. Selain itu juga, harga komoditi ditentukan oleh sistem pasar yang dikendalikan oleh pemilik modal dan bukan oleh para petani sendiri.⁹ Permasalahan struktural lainnya adalah habitus kebudayaan yang cenderung menindas sesama dan yang memiskinkan masyarakat secara ekonomis. Hal ini termaktub dalam sistem patriarkat yang menindas perempuan dan acara seremonial adat yang memakan biaya yang cukup besar.

Permasalahan kedua yang melanda masyarakat adalah pencaplokan dan pengerusakan lahan pertanian masyarakat desa oleh sejumlah industri ekstraktif yang beroperasi di Manggarai Raya. Pada tahun 2009 pemerintah di tiga kabupaten yakni Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur menerbitkan kurang lebih 50 IUP (Izin Usaha Pertambangan). Penerbitan izin usaha ini diperuntukkan bagi 20 perusahaan transnasional yang meliputi izin eksplorasi umum dan izin usaha jasa pertambangan.¹⁰

Kehadiran industri ekstraktif berskala besar ini sungguh meresahkan masyarakat desa di Manggarai. Kehadiran industri pertambangan yang menghancurkan ekosistem ini merupakan model pemiskinan sistemik yang paling masif sebab mampu membuat masyarakat menggantungkan hidupnya pada sistem ekonomi kapitalis. Masyarakat seringkali diberdayai sehingga mereka terjerambab

⁹ Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng, *Dokumen Sinode III Keuskupan Ruteng 2013-2015* (Yogyakarta: asdaMEDIA, 2017), hlm. 199.

¹⁰ Alex Jebadu, *op. cit.*, hlm. 154.

ke dalam mekanisme pasar yang justru menempatkan mereka pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan dominasi korporasi.¹¹

Masalah dasar ketiga yang terjadi adalah sentra pariwisata yang beroperasi di Manggarai mengancam eksistensi dan identitas masyarakat lokal. Secara eksistensial, sentra pariwisata di wilayah keuskupan Ruteng khususnya di tiga wilayah Manggarai cenderung dikuasai oleh orang-orang asing. Mereka adalah para pemilik modal yang datang menginvestasikan modalnya di tanah Manggarai. Sistem ekonomi yang mereka anut adalah sistem ekonomi pasar bebas atau neoliberalisme/kapitalisme. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas Perizinan Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 21 Januari 2020 lalu, sampai dengan triwulan III tahun 2019 ada 118 perusahaan asing yang menguasai investasi pariwisata super premium di Labuan Bajo. Kondisi ini kian mempertajam kesenjangan antara kaum pemilik modal/elitis dengan masyarakat kecil yang teralienasi dari tanahnya sendiri. Hal ini tampak dalam geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil khususnya di kota Labuan Bajo dalam mana banyak sekali orang-orang miskin di gubuk reot yang bertetangga dengan orang-orang kaya.¹²

Pelbagai permasalahan di atas, mengerucut pada satu permasalahan yakni melemah atau merosotnya potensi ekonomi (sumber daya alam dan sumber daya manusia) masyarakat di tiga Kabupaten yakni Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur yang termasuk dalam cakupan wilayah Keuskupan Ruteng. Dalam menanggapi persoalan tersebut, Gereja Keuskupan Ruteng pun berikhtiar untuk merancang sebuah program yang akan diimplementasikan dalam reksa pastoral-praktis. Program tersebut dinamakan sebagai Program Ekonomi Berkelanjutan: Sejahtera, Adil dan Ekologis (SAE). Tujuan dari pengimplementasian program pastoral ini adalah ingin memberdayakan kembali potensi ekonomi (sumber daya alam dan sumber daya manusia) umat Keuskupan Ruteng yang mengalami pelemahan akibat adanya tindakan fatalistik dalam pengaplikasian sistem perekonomian global yakni sistem ekonomi neoliberalisme yang cenderung mengejar profit dan mengabaikan mutu pembangunan manusia. Sejalan dengan

¹¹ Benny Denar, "Ekosida, Bunuh Diri Ekologis, dan Kemestian Teologi Ekologi", dalam Max Regus dan Fidelis Den (eds.), *op. cit.*, hlm. 269.

¹² Silvianus M. Mongko, "Pembangunan Pariwisata, Ancaman Lokalitas dan Peran Sosial Gereja", dalam Max Regus dan Fidelis Den (eds.), *ibid.*, hlm. 326.

upaya pemberdayaan potensi perekonomian, Gereja Keuskupan Ruteng juga hendak mengupayakan pemberdayaan kualitas, mentalitas dan moralitas masyarakat yang dilihat dan dinilai kian melemah atau merosot. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh Gereja Keuskupan Ruteng tidak saja menyangkut peningkatan perekonomian masyarakat melainkan juga menyangkut penguatan solidaritas antargenerasi dan perjuangan untuk mencapai keadilan serta peniadaan kemiskinan.

Menurut penulis, Ajaran Sosial Gereja (ASG) menjadi landasan utama yang melatarbelakangi upaya Gereja Keuskupan Ruteng dalam memberdayakan ekonomi umat melalui implementasi program ekonomi berkelanjutan. Ajaran Sosial Gereja merupakan suatu bentuk suara kenabian atau analisis kritis yang didengungkan oleh Gereja dalam menanggapi permasalahan sosial seturut konteks zaman. Dalam hal ini Gereja berikhtiar untuk mewartakan kabar Gembira Injili ke dalam situasi sosial yang begitu runyam akibat adanya ketidakadilan struktural di tengah masyarakat. Dalam menanggapi pelbagai persoalan sosial tersebut, Gereja tidak saja berbicara secara teoritis melainkan juga terlibat secara aktif dalam usaha memperjuangkan keadilan di tengah masyarakat.¹³

Seturut semangat Ajaran Sosial Gereja, upaya yang dilakukan Gereja Keuskupan dapat dibaca sebagai suatu analisis kritis dan tanggapan atas pelbagai persoalan ekonomi yang dihadapi oleh umat Keuskupan Ruteng. Upaya yang dijalankan oleh Gereja Keuskupan Ruteng tidak hanya sampai pada hal-hal teoritis melainkan juga merambah pada praksis nyata yakni melalui pengimplentasian program ekonomi berkelanjutan.

Berangkat dari pelbagai persoalan yang terjadi dan kerangka pemikiran di atas, penulis hendak membahas tema ini dengan sebuah judul **Implementasi Program Ekonomi Berkelanjutan dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Keuskupan Ruteng Berdasarkan Perspektif Ajaran Sosial Gereja.**

¹³ Frans Magnis-Suseno, "Ajaran Sosial Gereja" (Manuskrip, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Diryakara, Jakarta, 1983), hlm. 8-9.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah utama yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah *Bagaimana Implementasi Program Ekonomi Berkelanjutan dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Keuskupan Ruteng Ditinjau dari Perspektif Ajaran Sosial Gereja?*

Masalah utama ini dijelaskan dalam beberapa sub-masalah, antara lain:

1. Apa yang dimaksudkan dengan Program Ekonomi Berkelanjutan?
2. Apa yang dimaksudkan dengan Pemberdayaan Ekonomi?
3. Siapa itu Gereja Keuskupan Ruteng?
4. Apa itu Ajaran Sosial Gereja?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui tulisan ini, penulis hendak mencapai beberapa tujuan berikut: *Pertama*, menjelaskan dan membahas tentang program ekonomi berkelanjutan. *Kedua*, menjelaskan tentang pemberdayaan ekonomi. *Ketiga*, mengetahui dan membahas tentang Gereja Keuskupan Ruteng. *Keempat*, menjelaskan dan membahas mengenai Ajaran Sosial Gereja. *Kelima*, menjelaskan implementasi program ekonomi berkelanjutan dalam pemberdayaan umat di Keuskupan Ruteng berdasarkan perspektif Ajaran Sosial Gereja.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Para Pelayan Pastoral Keuskupan Ruteng

Melalui penelitian ini, para pelayan pastoral Keuskupan Ruteng diharapkan untuk mampu mendalami dan mengejawantahkan pelbagai seruan profetis dan anjuran-anjuran pastoralnya terkait dengan kehidupan ekonomi umat seturut semangat Ajaran Sosial Gereja.

1.4.2 Bagi Umat Keuskupan Ruteng

Melalui penelitian ini, umat Keuskupan Ruteng diharapkan memiliki pemahaman yang mumpuni dalam membangun kehidupan perekonomiannya seturut semangat Ajaran Sosial Gereja.

1.4.3 Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, Pemerintah diharapkan untuk membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang adil dan seturut seruan profetis serta anjuran-anjuran pastoral Gereja yang didasarkan pada Ajaran Sosial Gereja.

1.4.4 Bagi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero

Melalui Penelitian ini, IFTK Ledalero diharapkan untuk menjadi saluran utama yang mampu menyuarakan dan mendaratkan Ajaran Sosial Gereja dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat khususnya dalam aspek ekonomi.

1.5 Asumsi dan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penulis berasumsi bahwa implementasi program ekonomi berkelanjutan dalam pemberdayaan umat di Keuskupan Ruteng selaras dengan semangat yang termaktub dalam Ajaran Sosial Gereja (ASG). Adapun hipotesis-hipotesis yang muncul dari asumsi di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, umat Keuskupan Ruteng sekarang ini mengalami pelemahan ekonomi. *Kedua*, implementasi program ekonomi berkelanjutan dapat memberdayakan ekonomi umat di Keuskupan Ruteng yang tengah mengalami pelemahan.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha mendeskripsikan dan mendalami dokumen-dokumen yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen Sinode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng, Hasil Sidang Pastoral Post-Natal 2023 Keuskupan Ruteng dan Hasil Sidang Post-Natal 2024 Keuskupan Ruteng. Sumber-sumber tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian yang dilakukan oleh Gereja Keuskupan Ruteng. Selain beberapa sumber utama di atas, penulis juga menggunakan sumber-sumber rujukan lainnya seperti dokumen Gereja, data hasil

kajian Badan Pusat Statistik (BPS) dan literatur-literatur ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

1.6.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang penulis jalankan adalah sebagai berikut. *Pertama*, penulis berdiskusi dengan para dosen pembimbing untuk menentukan tema penelitian. *Kedua*, penulis kemudian membuat proposal penelitian dan merumuskan masalah berdasarkan tema penelitian tersebut. *Ketiga*, setelah proposal penelitian tersebut disetujui oleh para dosen pembimbing, penulis selanjutnya mengecek ketersediaan data yang terdapat di perpustakaan dan pada pihak sekretariat Keuskupan Ruteng. *Keempat*, penulis membuat studi dokumen untuk mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan tema penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai teknik atau instrumen pengumpulan data. Melalui hal ini, penulis membuat suatu kajian yang mendalam atas pelbagai dokumen dan literatur kepustakaan lainnya. Penulis kemudian mengumpulkan beberapa dokumen yang relevan dengan tema dan permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen sinode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng, dokumen Hasil Sidang Pastoral Post-Natal 2023 Keuskupan Ruteng dan dokumen Hasil Sidang Post-Natal 2024 Keuskupan Ruteng serta pelbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Setelah semua data utama terkumpul, penulis menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan teknik analisis data sekunder. Teknik ini dilakukan dengan cara menginterpretasi data dan menarik kesimpulan atas data yang telah diinterpretasi.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian tersebut memiliki ruang lingkungannya tersendiri. Hal ini membantu penulis agar fokus pada tema yang telah ditentukan. Penulisan tesis ini berfokus pada tema bahasan mengenai implementasi program ekonomi berkelanjutan yang

dijalankan oleh Gereja Keuskupan Ruteng yang ditinjau dari persepektif Ajaran Sosial Gereja. Oleh karena itu, sasaran dari penelitian ini adalah meninjau implementasi program ekonomi berkelanjutan dalam pemberdayaan umat di Keuskupan Ruteng berdasarkan perspektif Ajaran Sosial Gereja (ASG).

1.8 Definisi dan Batasan Istilah

Dalam penulisan tesis tersebut, penulis menggunakan beberapa istilah kunci. *Pertama*, ekonomi berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan yang dimaksudkan penulis dalam hal ini adalah suatu bentuk usaha pemberdayaan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek solidaritas antargenerasi yakni dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tanpa mengorbankan martabat manusia.

Kedua, pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi yang penulis maksudkan adalah suatu upaya untuk mendongkrak dan menguatkan potensi ekonomi (sumber daya alam dan sumber daya manusia) masyarakat yang melemah atau merosot akibat pengimplementasian sistem ekonomi global yang hanya mencari profit semata sembari mengorbankan ekosistem dan martabat manusia. Selain mendongkrak dan menguatkan potensi ekonomi masyarakat, pemahaman pemberdayaan ekonomi yang penulis maksudkan juga menyangkut peningkatan kualitas, mentalitas dan moralitas masyarakat. Penulis menemukan bahwa ada distingsi yang tegas antara pemberdayaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi merujuk pada kualitas atau potensi masyarakat sementara itu pertumbuhan ekonomi merujuk pada penumpukan profit semata.

Ketiga, Gereja Keuskupan Ruteng. Gereja Keuskupan Ruteng yang dimaksudkan penulis dalam tulisan ini adalah para pelayan pastoral yang tergabung dalam cakupan wilayah Keuskupan Ruteng (Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat). Secara konkret, pelayan pastoral yang dimaksudkan penulis adalah uskup diosesan, para imam, Dewan Pastoral Paroki (DPP) sekeuskupan Ruteng, para pemimpin lembaga serta tarekat di wilayah cakupan Gereja Keuskupan Ruteng dan para pemerintah dari tiga Kabupaten di Manggarai Raya.

Keempat, Ajaran Sosial Gereja. Ajaran Sosial Gereja yang penulis maksudkan lebih kepada pemahaman yang bersifat umum yakni ide atau pemikiran Gereja dalam menanggapi permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya permasalahan ekonomi. Penulis tidak bermaksud untuk

menjelaskan semua Ajaran Sosial Gereja yang dikeluarkan oleh para Paus tetapi hanya Ajaran Sosial Gereja yang berbicara tentang peran Gereja dalam menciptakan kondisi ekonomi yang memadai bagi masyarakat.

Dalam tulisan ini pula, penulis tidak berusaha untuk menyamakan pemahaman antara Ajaran Sosial Gereja dengan dogma atau ajaran resmi Gereja yang cenderung bersifat kaku. Dogma atau aturan resmi Gereja lebih kepada suatu ajaran yang mengatur relasi interpersonal antara manusia dan Tuhan. Sementara itu Ajaran Sosial Gereja merupakan tanggapan atau tilikan kritis Gereja atas persoalan sosial yang terjadi di tengah dunia.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan tulisan yang berisikan latar belakang penulisan tema, alasan pemilihan judul serta pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Bab ini juga berisikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi dan hipotesis penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi dan batasan istilah serta sistematika penulisan itu sendiri.

Dalam bab II penulis akan membahas dua hal pokok. *Pertama*, program ekonomi berkelanjutan Keuskupan Ruteng dan konsep mengenai Pemberdayaan Ekonomi. Sebelum membahas mengenai program ekonomi berkelanjutan yang dicanangkan oleh Gereja Keuskupan Ruteng, penulis terlebih dahulu akan membahas konsep mengenai ekonomi berkelanjutan. *Kedua*, pemberdayaan ekonomi. Hal-hal yang dibahas dalam hal ini adalah konsep, pendekatan dan upaya pemberdayaan ekonomi.

Dalam bab III, penulis akan membahas secara lebih komprehensif dua hal pokok yakni Gereja Keuskupan Ruteng dan Ajaran Sosial Gereja.

Dalam bab IV, penulis akan membahas mengenai implementasi program ekonomi berkelanjutan yang dijalankan oleh Gereja Keuskupan Ruteng dan menganalisis serta meninjau implementasi program tersebut dalam perspektif Ajaran Sosial Gereja.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang mesti menjadi pedoman sikap dari pelbagai pihak, seperti para pelayan pastoral Keuskupan Ruteng, seluruh umat Keuskupan Ruteng, pemerintah, para *stakeholder* ekonomi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).